

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pembangunan pada hakekatnya adalah kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan kegiatan memperbaiki, mendirikan bahkan menumbuhkan serta meningkatkan daya upaya yang mengarah kepada keadaan yang lebih baik dengan dilandasi oleh semangat, kemauan dan tekad yang tinggi yang bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya. Tujuan tersebut baru dapat dicapai apabila pembangunan nasional dilaksanakan secara menyeluruh dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya bukan manusia, serta pelaksanaan pembangunan disegala bidang, terencana, terarah, bertahap dan berkesinambungan. Salah satu bidang tersebut Adalah pembangunan manusia seutuhnya. Dalam hal ini keberhasilan pembangunan tergantung pada aspek manusianya yakni sebagai pemimpin, pelaksana dan pengelola sumber daya yang ada dalam nagara, yang dalam hal ini Adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), terutama Pada Kantor Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Bone Bolango. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Bone Bolango yang merupakan aparatur Negara yang menyelenggarakan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional merupakan tulang punggung pemerintah. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Nasional terutama tergantung pada kesempurnaan apratur negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana dikemukakan di atas,

diperlukan adanya pegawai negeri sipil yang penuh kesediaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Dan Pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat berdaya guna, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, dan tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000. Kedua Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan pedoman pelaksanaan mutasi kepegawaian di setiap instansi pemerintah umum dan daerah terutama pada kantor Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Bone Bolango. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999, bahwa yang termasuk pegawai negeri sipil Adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan satu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sempurna sebagaimana diamksudkan di atas, maka pegawai negeri sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya dan diadakan pengembangan. Tujuan pembinaan dan pengembangan (Fathoni, 2006:194) tersebut diharapkan agar setiap pegawai yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dapat memberikan prestasi kerja yang sebaik-baiknya sehingga benar-benar dapat berfungsi sebagai penghasil kerja yang tepat guna sesuai dengan sasaran organisasi yang hendak dicapai, terwujudnya

hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan dan terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, sehingga pegawai hanya mengabdikan kepada kepentingan Negara dan masyarakat, demi terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa. Salah satu bentuk dari pengembangan terhadap pegawai negeri sipil adalah mutasi sebagai penjelmaan/perwujudan dari dinamika organisasi yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasi.

Dari hasil observasi yang saya lakukan ada beberapa landasan yang terdapat pada landasan kebijakan mutasi pegawai di kantor badan kepegawaian dan diklat kabupaten bone bolango yaitu: 1). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 2009 tentang wewenang pengangkatan, pindah dan pemberhentian pegawai negeri sipil. 2). Peraturan pemerintahan nomor 100 tahun sebagaimana telah diubah peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan. 3). Keputusan Bupati nomor 303 tentang pendelegasian tentang mutasi pegawai negeri sipil.

Pelaksanaan mutasi juga perlu adanya perencanaan. Adapun dari perencanaan pelaksanaan mutasi pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Bone Bolango di lihat dari analisis jabatan di setiap unit kerja di dasarkan pada kompetensi pendidikan masing masing pegawai yang bekerja. Karena pada dasarnya pelaksanaan mutasi juga merupakan fungsi untuk mengembangkannya untuk meningkatkan pegawai karena tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja pegawai dalam suatu unit mereka

yang bersangkutan. Umumnya pelaksanaan mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja pegawai. Kepentingan pelaksanaan mutasi kalau kita kembali kepada tujuan utama mutasi yaitu tercapainya efisiensi dan efektifitas kerja pegawai negeri sipil, dengan adanya pelaksanaan mutasi juga kita dapat mengetahui tingkat kemampuan dan tanggung jawab bagi pegawai negeri untuk menjalankan tugas mereka masing-masing.

Pelaksanaan mutasi pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Bone Bolango juga berjalan dengan lancar. Tujuan tersebut yang berhasil mereka dapatkan karena mereka bekerja telah mendirikan bahkan menumbuhkan serta meningkatkan daya upaya yang mengarah kepada keadaan yang lebih baik dengan dilandasi oleh semangat kerja pegawai untuk segerah melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik sampai mencapai tujuan yang di inginkan. Tujuan tersebut baru juga bias dapat membangun dan meningkatkan pengetahuan yang akan di dapatkan oleh pegawai yaitu pengetahuan yang mereka dapatkan dari kerja keras mereka dan juga pelaksanaan mutasi dilaksanakan secara menyeluru dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya bukan manusia, serta pelaksanaan mutasi di segala bidang, yang terencana, terarah, bertahap dan berkesinambungan. Dalam hal ini keberhasilan untuk lebih meningkatkan semangat kerja bagi masing-masing pegawai itu tergantung pada pada aspek-aspek manusianya yakni guan untuk melaksanakan tugas yang akan mereka lakukan di Kantor Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Bone Bolango yang merupakan aparatur Negara yang

menyelenggarakan pemerintahan dan menambah semangat kerja dan kreatifitas pegawai guna untuk kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan mutasi pegawai di satu unit pemerintahan yaitu Kantor Badan Kepegawaian Dan Diklat Dikabupaten Bone Bolango.

Pelaksanaan mutasi di lakukan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, dan tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut merupakan pedoman pelaksanaan mutasi kepegawaian di setiap instansi pemerintahan umum dan daerah terutama pada Kantor Badan Kepegawaian Dan Diklat Di Kabupaten Bone Bolango. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999, bahwa yang termasuk Pegawai Negeri Sipil Adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan satu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sempurna sebagaimana diamksudkan di atas, maka Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya dan diadakan pengembangan.

Salah satu bentuk dari pengembangan terhadap Pegawai Negeri Sipil adalah mutasi sebagai penjelmaan/perwujudan dari dinamika organisasi yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasi. Mutasi tidak terlepas dari alasan untuk mengurangi rasa bosan pegawai kepada pekerjaan serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai, selain itu untuk memenuhi

keinginan pegawai sesuai dengan minat dan bidang tugasnya masing-masing dimana dalam kegiatan pelaksanaan mutasi kerja sering disalah tafsirkan orang yaitu sebagai hukuman jabatan atau didasarkan atas hubungan baik antara atasan dengan bawahan. Dalam pelaksanaan mutasi harus benar-benar berdasarkan penilaian yang objektif dan didasarkan atas indeks prestasi yang dicapai oleh karyawan mengingat sistem pemberian mutasi dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi para pegawai negeri sipil untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Maka dari itu mutasi dilakukan di landasi dengan pelaksanaan yang telah mereka beri terutama Di Kantor Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Bone Bolango. Dengan danya pelaksanaan mutasi tidak dapat menurunkan semangat kerja para pegawai. Karena indicator dari turunya semangat kerja antara lain rendahnya produktivitas, tingkat absensi pegawai tinggi, gaji renda, dan lain-lain.

Mutasi pegawai juga perlu mempertimbangkan banyak segi misalnya kesejahteraan para pegawai, perhatian terhadap factor ini mutlak di lakukan, karena mutasi yang di perhatikan kesejahteraan pegawai maka dapat merangsang pegawai untuk bekerja lebih baik dan secara terus menerus meningkatkan kinerjanya. Karena pada awalnya pegawai kadang belum nisa menerima keputusan yang telah diambil oleh unitnya masing-masing untuk melakukan mutasi,oleh karena itu perlu ada beberapa kebijakan terhadap pegawai yang bersangkutan. pelaksanaan mutasi pegawai yang dilaksanakan seperti ini dapat meningkatkan gairah kerja dan akuntabilitas yang tinggi terhadap pekerjaan.

Hal ini yang mendorong penulis untuk meneliti tentang pelaksanaan mutasi yang dikaitkan dengan semangat kerja pegawai dengan semangat kerja pegawai dengan pemikiran bagaimana upaya untuk menumbuhkan semangat kerja dikalangan pegawai sehingga semangat kerja pegawai dapat meningkat, khususnya pegawai di Dinas tenaga kerja Di Daerah Bone Bolango.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan mutasi yang dilakukan di Kantor Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Bone Bolango sudah berjalan sesuai dengan yang di harapkan. pelaksanaan mutasi yang dilakukan lebih memperhatikan beberapa aspek kesejahteraan pegawai dan memperhatikan secara maksimal kinerja dari para pegawai tersebut agar pegawai bisa menerima adanya mutasi terhadap mereka yang di mutasi dan juga tidak menurunkan semangat kerja pegawai.

Adapun dampak dari pelaksanaan mutasi di Kantor Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Bone Bolango, karena ketidak tersedianya (SDM) Sumber Daya Manusia dalam pekerjaan yang akan di lakukan pegawai. akan tetapi pegawai bisa dan mampu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan cara mereka masing-masing agar bisa dapat menyelasikannya. Pegawai Di Kantor Badan Kepegawaian Dan Diklat Di Kabupaten Bone Bolango, mereka memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah di berikan dan saling bekerja sama agar bisa mencapai tujuan yang mereka inginkan terutama dalam bidang mutasi.

Dengan adanya pelaksanaan mutasi pegawai di kantor Badan Kabupaten Bone Bolango bisa melihat perkembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab bagi pegawai, dan menambah kreatifitas mereka untuk bekerja.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari identifikasi masalah maka dalam penelitian ini di fokuskan pada :

- 1) Penerapan analisis jabatan dalam mutasi Pegawai .
- 2) Promosi dan Pengembangan karir pegawai dengan adanya pelaksanaan mutasi pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Bone Bolango.
- 3) Dampak pelaksanaan mutasi pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Bone Bolango.

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui Penerapan analisis jabatan dalam mutasi Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 2) Dapat mengetahui promosi dan pengembangan karir Pegawai dengan adanya pelaksanaan mutasi Pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Bone Bolango.
- 3) Menegtahui dampak-dampak pelaksanaan mutasi pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Bone Bolango.

### **D. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan banding kepada pemerintah Kabupaten Bone Bolango terhadap pelaksanaan mutasi pegawai yang di lakukan di setiap tahun



2. Sebagai bahan informasi kepada pengambil pelaksanaan terutama di Kantor Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Bone Bolango tentang strategi yang dapat dilakukan terkait dengan pelaksanaan mutasi pegawai.
3. Bermanfaat bagi peneliti lanjutan terutama yang terkait dengan masalah pelaksanaan mutasi pada populasi yang lain.